

VIII. KESIMPULAN DAN SARAN

8.1. Kesimpulan

Masyarakat Jawa Pasar VI Kualanamu terbentuk dari *koeli contract* yang dibawa oleh perusahaan perkebunan (*onderneming*) dibantu pemerintah kolonial Belanda ke Tanah Deli (Sumatra Timur – kini Sumatera Utara) pada tahun 1890an untuk menjadi buruh perusahaan perkebunan tembakau Belanda. Setelah masa nasionalisasi perkebunan Belanda, masyarakat Jawa Kualanamu secara turun-temurun bekerja pada perkebunan baru, perusahaan dan lahan asal nasionalisasi yang dibentuk pemerintah Republik Indonesia. Mereka hidup dengan menjalankan filosofi, sosio-kultural, ekonomi tradisional dan kearifan lokal adat budaya orang Jawa seperti di tempat asalnya, Pulau Jawa, namun telah mengalami sedikit perubahan-perubahan.

Pada sisi lain, pesatnya perkembangan perekonomian Sumatera Utara dan kota Medan membutuhkan mobilitas barang dan jasa secara cepat, volume mobilisasi barang dan jasa terus meningkat. Bandara internasional Polonia tidak memadai menampung perkembangan volume barang dan jasa tersebut. Berbagai masalah juga terjadi pada bandara Polinia, antara lain, bandara terletak di tengah kota Medan, dimana pembangunan berkembang pesat. Masalah kecelakaan penerbangan yang begitu sering, hingga masalah dan insiden internal bandara, seperti pelayanan yang buruk, kebakaran unit bangunan bandara dan sering jadi sasaran aksi demonstrasi. Intinya, pemerintah menyimpulkan, Polonia sebagai bandara bertaraf internasional sudah tidak layak atau tidak memadai dan harus diganti dengan bandara baru di luar kota Medan.

Perencanaan pembangunan bandara internasional Kualanama telah dimulai sejak tahun 1991, wacana tersebut dilontarkan oleh Menteri Perhubungan Azwar Anas, (saat itu). Tahun 1992 dilakukan berbagai studi (penentuan lokasi, master plan dan analisis

mengenai dampak lingkungan – AMDAL) rencana pembangunan bandara Kualanamu. Namun tidak satupun studi yang dilakukan mengenai dampak sosial budaya pada masyarakat lokal (sekitar). Ini merupakan kelemahan studi-studi pembangunan masa lalu yang akhirnya menghancurkan tatanan ekonomi tradisional, tatanan sosial dan budaya masyarakat lokal (*involusi* pembangunan bagi budaya masyarakat masyarakat lokal). Saat itu, hampir semua pembangunan dilaksanakan dengan model perencanaan pembangunan pemerintahan Orde Baru yang *top down* dalam kondisi pemerintahan yang otoriter (*pembangunan yang memaksa*).

Rencana pembangunan bandara *megah* ini berpuluh kali mengalami penundaan. Berbagai penyebab menjadi alasan; kondisi keuangan negara, krisis ekonomi, tidak ada investor berminat, dan kendala pembebasan tanah yang berhadapan dengan masyarakat Jawa Pasar VI Kualanamu.

Seiring pergantian era di Indonesia, dari era pemerintahan Orde Baru sampai ke era reformasi, dimana pemerintahan demokratis terbentuk, maka percepatan pembangunan bandara dilakukan dan di tengah jalan (tahun 2011) masuk dalam skema Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang dirancang oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono bersama Jusuf Kalla.

Masyarakat Jawa Pasar VI Kualanamu terancam tergusur dari pemukiman dimana 4 generasi masyarakat telah menetap di sana. Ancaman ini membuat mereka gusar dan berupaya mencari cara, sebagai bentuk strategi adaptasi, untuk menyelamatkan pemukiman dan lahan pertanian. Mendapatkan dukungan materil, moril dan intelektual, merupakan strategi perjuangan yang dilakukan dengan damai (*non violence*/tanpa kekerasan). Saat itu muncul perubahan pola pikir masyarakat Jawa Pasar VI Kualanamu. Mereka melakukan *perlawanan* untuk tetap bertahan pada tanah berpijaknya. Perlawanan

dilakukan dengan berbagai cara dan organisasi *modern* dengan dukungan dari berbagai pihak yang simpati.

Awalnya perlawanan bertujuan mempertahankan kampung halamannya, kemudian berubah (bentuk filosofi *manut* dan *nunut* yang dipengaruhi oleh kultur orang Jawa) dengan menurunkan target tujuan, yakni memperjuangkan relokasi (pemindahan kolektif warga). Tuntutan relokasi merupakan tuntutan *minimalis* dari masyarakat Pasar VI Kualanamu. Penurunan target perjuangan masyarakat Jawa Pasar VI Kualanamu tersebut juga merupakan satu bentuk adaptasi dari keterdesakan dan tidak punya pilihan.

Proses *berhadapan* antara masyarakat Jawa Pasar VI Kualanamu dengan pembangunan bandara selama 13 tahun menimbulkan banyak perubahan bagi masyarakat:

1. Perubahan kultural. Minimal 2 perubahan masyarakat Jawa Kualanamu terjadi: kebiasaan, filosofi orang Jawa dianut dan adat istiadat. Orang Jawa Kualanamu yang biasanya jarang *marah* cenderung menjadi *pe marah* dan melakukan perlawanan. Berbagai adat seperti *kenduri*, *suroan*, *punggahan*, *pidunan* dan adat istiadat Jawa yang lain tidak lagi dilakukan orang Jawa Pasar VI Kualanamu karena kondisi ekonomi dan konsentrasi melakukan perlawanan. Dua perubahan kultural ini mengakibatkan perubahan budaya terjadi pada masyarakat.
2. Perubahan ekonomi. Masyarakat yang sebelumnya mencari nafkah sebagai buruh perkebunan dan bertani (*agrikultur*), akibat dari pembangunan bandara akhirnya mereka menyesuaikan diri dengan lapangan pekerjaan pada kultur modernisasi yang tersedia di sela-sela sulitnya pekerjaan. Lapangan pekerjaan tersebut sangat sedikit tersedia hanya pada buruh rendahan di bandara dan buruh kilang batu, juga sopir dan pekerjaan rendah yang lain. Hal ini mengakibatkan kondisi masyarakat kesulitan ekonomi keluarga yang bermuara pada kesulitan pangan. Saat masyarakat berada di pemukiman lama (*dalam tembok*) masyarakat masih dapat

bercocok tanam dan menghasilkan pangan selain dari gaji sebagai buruh perkebunan.

Kebiasaan yang mengandung kearifan lokal secara ekonomis, seperti *kembang suruh*, *jemputan* atau *baskoman* juga tidak berjalan lagi. Budaya (*praktik kebiasaan baik*) masyarakat Jawa Pasar VI Kualanamu telah benar-benar *tergerus* atau bahkan *punah*.

3. Perubahan sosial. Sangat menonjol terjadi pada hubungan kekerabatan dan hubungan sosial antar tetangga. Terpecah-belahnya hubungan antara saudara *sekandung* (*tunggal satu perut*) atau saudara *batih*, terutama orang Jawa yang berada dalam tembok dengan saudaranya yang berada di luar tembok. Hubungan ini terpecah karena tekanan yang dilakukan PTPN2 melalui hubungan kerja (*tuan/majikan dan buruh*) dan pihak pengembang pembangunan bandara kepada saudara *batih* yang berada di luar tembok di bawah pengaruh dan tekanan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi mereka yang bekerja di perkebunan dan pengaruh materil yang dijanjikan bagi saudara *batih* yang bukan pekerja perkebunan. Begitu buruknya hubungan *batih* antara saudara *sekandung* tersebut, hingga (*ekstimnya*) saat bertemu di jalan tidak saling sapa. Lebih parah lagi saat hari lebaran, saudara yang lebih muda tidak berkunjung ke tempat saudara yang lebih tua. Di mana menurut adat dan *tata krama* orang Jawa, hal tersebut adalah kewajiban. Tidak jarang terjadi saling maki dan *eskete* (tidak saling bicara dalam waktu yang sangat panjang) antara keluarga *batih*.

Demikian juga hubungan antar tetangga yang bukan saudara atau keluarga *batih*. Terjadi perpecahan yang hebat antara masyarakat Jawa Pasar VI Kualanamu yang berada dalam satu teritorial satuan pemerintah desa, antara masyarakat yang berada di dalam dan di luar tembok. Saling *ejek*, fitnah, hasut dan berbagai bentuk

pertentangan yang lain terjadi pada sebagian besar antara mereka. Tembok pembangunan bandara megah tersebut telah berhasil memecah belah kerukunan sosial dan kekerabatan, menghancurkan praktik baik ekonomi dan kearifan lokal, *menggerus* adat budaya orang Jawa hingga mereka meninggalkan *tercerabut* dari akar budayanya.

Bagi negara sebagai *pemangku* hak tanah secara *dejure*, pembangunan adalah segalanya untuk memenuhi kepentingan umum yang lebih luas, masyarakat lokal adalah *hama* pengganggu bagi *tumbuhnya pohon* pembangunan. Bagi masyarakat lokal sebagai pemangku hak defakto, ulayat dan budaya yang diturunkan keahlian (*kultur*) agraris, pembangunan adalah ancaman yang akan membinasakan kehidupan mereka di masa depan.

4. Perubahan peningkatan intelektual. Tidak semua perubahan yang terjadi pada masyarakat Jawa Pasar VI Kualanamu bersifat negatif. Perubahan positif sebagai strategi adaptasi juga terjadi dalam bentuk peningkatan pola pikir kreatif dan daya kritis, keberanian berbicara, peningkatan hubungan (*relasi*) sosial politik pada para pihak yang dianggap lebih tinggi, pemahaman tentang hak-hak warga negara, strategi bertahan daya hidup (*survivalitas*), kemampuan masyarakat menganalisa keadaan (*analisis struktural*), hingga kreasi-kreasi tinggi dalam bentuk konsep dan strategi untuk mencapai tujuan.

Selain perubahan positif pada poin ke 4 yang dikembangkan antara masyarakat dan NGO pendamping/pendukung masyarakat. Paparan panjang lebar di atas dapat dipadatkan dalam satu kalimat. “Pembangunan bandara Kualanamu Internasional Airport mengakibatkan *dehumanisasi*, khususnya pada ekonomi, sosial budaya masyarakat Jawa Pasar VI Kualanamu (masyarakat lokal).

Pembangunan bandara Kualanamu yang diterapkan pemerintah, menganut pola pembangunan struktural yang dikembangkan oleh Hollis Chenery yang menyarankan adanya perubahan struktural produksi, pergeseran dari pertanian tradisional ke industri pada saat pendapatan perkapita meningkat.

Himpunan perubahan saling berkaitan dalam struktur perekonomian suatu negara untuk berubah dari sistem perekonomian tradisional kepada sistem ekonomi modern. Perubahan struktur melibatkan seluruh fungsi ekonomi, transformasi produksi, perubahan komposisi permintaan konsumen, perdagangan internasional dan perubahan sosial ekonomi.

Menurut Elkana Goro Leba¹, teori ini tidak menghargai karakteristik masyarakat dan budaya lokal (petani), sebab paradigma strukturalis menginstruksikan negara berkembang yang berkarakteristik subsisten (pertanian tradisional berdasarkan belas kasih alam/alami) dipaksa bertransformasi pada struktur ekonomi modern berorientasi kehidupan perkotaan. Dengan demikian, potensi, kebiasaan masyarakat lokal, kearifan lokal, akan hilang bertransformasi secara radikal pada kehidupan modern yang *individualistik*.

Adaptasi dan akibat besar dari pembangunan pola struktural ini terhadap masyarakat lokal adalah:

1. Mengesampingkan karakteristik budaya, dan potensi masyarakat lokal yang bisa saja diolah agar menjadi modal dalam memperkuat ekonomi masyarakat lokal.

¹ Dalam "Review Tiga Paradigma Pembangunan: Strukturalis, Humanis Dan Empowering". Publikasi jurnal online Academia dalam https://www.academia.edu/6719143/REVIEW_TIGA_PARADIGMA_PEMBANGUNAN_Strukturalis_Humanis_Dan_Empowering._Elkana_Goro_Leba. Di download 15 Agustus 2015.

2. Karena pendekatan pembangunan struktural yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, mengakibatkan berbagai bentuk ketimpangan sosial dan berbagai persoalan lain seperti timbulnya akumulasi nilai-nilai *hedonistic*, *asosial*, kerenggangan ikatan kekerabatan, dll.
3. Ketergantungan masyarakat desa pada pemerintah sebagai penguasa dalam pembuatan kebijakan pembangunan ekonomi. Minus pelibatan (partisipasi). Ketergantungan masyarakat pada birokrasi sentralistik yang memiliki daya *absorpsi* (penyerapan) sumber daya besar. Sebaliknya tidak memiliki kepekaan terhadap kebutuhan-kebutuhan lokal, secara sistematis mematikan inisiatif masyarakat lokal untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi.
4. *Meminggirkan* posisi ekonomi masyarakat lokal (*the development of under development*).
5. Menafikan eksistensi sistem sosio-kultural masyarakat lokal. Bagi masyarakat lokal, bukan kemajuan yang dihasilkan dari proses modernisasi (pembangunan) melainkan kemunduran kultural (*modernization without development*).
6. Pembangunan struktural menguntungkan pertumbuhan dan ekspansi modal serta proses akumulasi kapital bagi perekonomian Barat/Global. Negara tujuan investasi asing menjadi tempat berakumulasinya modal dan pasar bagi produk-produk kapital. Negara sasaran menjadi tempat pembuangan limbah dan polusi industri, sehingga negara tujuan harus menanggung resikonya juga *eksploitasi* tenaga kerja (buruh murah). Pada titik inilah berlangsung proses “*economic leakage*” (*pembocoran/kucuran* sumberdaya ekonomi) dari negara berkembang ke negara maju.

7. Pembangunan struktural mendorong proses-proses disintegrasi sosial-masyarakat di kawasan sedang berkembang. Dimana semangat kolektivitas (*gotong-royong*) sebagai ciri sosio-cultural penting hilang.

Dengan begitu, bagi masyarakat lokal, Pembangunan tidak menghasilkan kemajuan, melainkan justru semakin meningkatkan keterbelakangan (*the development of underdevelopment*). Melahirkan ketergantungan (*dependency*) negara sedang berkembang terhadap negara maju. Melahirkan ketergantungan masyarakat terhadap negara/pemerintah. Melahirkan ketergantungan masyarakat kecil (buruh, usaha kecil, tani, nelayan dll) terhadap pemilik modal.

Pada masa hadapan hendaknya pemerintah (negara) melakukan pembangunan yang seimbang. Pembangunan bermanfaat bagi tujuan pembangunan itu sendiri dan pembangunan juga bermanfaat bagi masyarakat lokal. Mengedepankan penghormatan terhadap ekonomi dan sosio-kultural masyarakat lokal tanpa *menggerusnya*. Pembangunan seperti ini dapat dilakukan dengan pendekatan perpaduan antara paradigma pembangunan *strukturalis* yang menjadi tujuan pembangunan itu sendiri, dengan paradigma *humanis* yang lebih menekankan nilai-nilai kemanusiaan, penghormatan dan peningkatan martabat manusia. Yang dalam tujuan pembangunan cenderung dilakukan berlandaskan pada etika dan moralitas.

Perpaduan pendekatan pembangunan berikutnya yang mesti digunakan adalah paradigma *empowering* atau pemberdayaan yang melakukan pelibatan pada masyarakat lokal dan institusi kultural lokal secara partisipatif. Masyarakat lokal menempati posisi utama sebagai pelaku yang ikut mengelola dan menikmati pembangunan. Negara berposisi sebagai fasilitator yang membuka dan menyediakan ruang kondusif bagi tumbuhnya prakarsa, partisipati, kreasi kultural dan institusi lokal.

8.2. Saran

1. Pembangunan sebaiknya dilakukan berdasarkan kajian hak-hak masyarakat lokal agar tidak *memarginalisasi* ekonomi masyarakat lokal. Penyediaan lahan bertani bagi masyarakat yang berkeahlian agraris dan pekerjaan lain yang sesuai dengan keahlian dasar dan kultural.
2. Pembangunan berdasarkan kajian sosial, budaya dan etnisitas masyarakat agar tidak menggerus budaya masyarakat yang di anut (*dehumanisasi*). Penyediaan fasilitas dan penghidupan kembali budaya masyarakat lokal.
3. Pemerintah (negara) melakukan pengesahan terhadap tanah tapak rumah yang kini ditempati 15 keluarga masyarakat Jawa Pasar VI Kualanamu dalam bentuk legal formal, surat sertifikat hak milik seperti yang direkomendasikan Komnas HAM.
4. Pemerintah (negara) dalam melakukan pembangunan seimbang dan berkeadilan bagi masyarakat lokal (bermanfaat bagi tujuan pembangunan dan bermanfaat bagi masyarakat lokal). Mengedepankan penghormatan terhadap ekonomi dan sosio-kultural masyarakat lokal tanpa *mengerusnya*. Pembangunan seperti ini dapat dilakukan dengan pendekatan perpaduan antara paradigma pembangunan *strukturalis*, *humanis* dan *empowering* atau pemberdayaan.

THE
Character Building
UNIVERSITY